

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan suatu Negara sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting dalam proses pembangunan tersebut. Menciptakan dan memelihara sumber daya manusia berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan membuat pendidikan, pelatihan, perawatan kesehatan, dan pemberdayaan manusia menjadi faktor- faktor kunci dalam Implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan memainkan peran kunci untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pembangunan.

Pendidikan merupakan alat utama untuk meningkatkan kualitas manusia dalam suatu negara. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan perkembangan sumber daya manusia merupakan strategi penting dalam Implementasi pembangunan suatu negara. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada penduduknya, negara dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan mampu bersaing di pasar global. Pendidikan tinggi dan berkualitas dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hal tersebut sesuai kajian yang dilakukan oleh Gusri dkk (2022 :426) bahwa :

“Masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih cepat mengerti dan memahami tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan”.

Adapun pasal yang menjelaskan hak warga Negara dalam mendapatkan pendidikan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran." Pasal 31 Ayat 1 tersebut menjadi dasar konstitusional yang menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan pendidikan kepada seluruh warga negara. Pendidikan di sini mencakup berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pasal 28C Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pasal ini mencakup hak-hak yang luas, termasuk hak untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) adalah undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. UUSPN memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nasional dan menetapkan prinsip-prinsip dasar serta tujuan pendidikan di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diakui oleh UUSPN adalah bahwa pendidikan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUSPN menegaskan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan agama Indonesia dalam sistem

pendidikan. UUSPN mengakui bahwa pendidikan harus selalu tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini mencerminkan pentingnya pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. UUSPN menyoroti pentingnya pendidikan non formal dan mengamanatkan bahwa jenis pendidikan ini akan terus dikembangkan. Pendekatan pendidikan non formal memang memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan dapat mencakup masyarakat yang beragam. Pendidikan non formal dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok yang mungkin sulit dijangkau oleh pendidikan formal, seperti mereka yang berada di daerah terpencil, kelompok etnis minoritas, orang dengan disabilitas, atau mereka yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rendah.

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengacu pada Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM Tahun 2011 dalam pedoman tersebut mengacu berdasarkan PP No.17 Tahun 2010. Berdasarkan laporan UNDP HDI (Human Development Index) yang menunjukkan Indonesia berada pada posisi 114 dari 191 negara di Tahun 2022. Meskipun Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan dalam bidang pembangunan manusia, termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia (HDI), masalah mutu pendidikan masih menjadi perhatian. Tantangan akses pendidikan di daerah terpencil, pedalaman, dan komunitas miskin memang menjadi permasalahan serius yang dapat menghambat tercapainya inklusivitas dan kesetaraan pendidikan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan peran

pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya Selain itu menurut Austang dkk (2021 :5) bahwa :

Beberapa faktor yang memengaruhi kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia melibatkan biaya, waktu, mutu pengajar, dan aspek lainnya. Selain itu juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Adawiah R (2017 :44) bahwa :

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pendidikan adalah tingkat sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia dan jumlah anak”.

Pendidikan non formal memiliki peran yang signifikan dalam membantu kelompok masyarakat yang mungkin tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan finansial atau usia sekolah yang telah lewat dan jarak sekolah yang jauh. Pendidikan non formal memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kelompok masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan formal. Pendidikan non formal tidak hanya membantu dalam atasi masalah buta huruf dan juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian individu. Hal ini dapat memberikan peluang kerja kepada mereka yang mengikuti pendidikan non formal.

Salah satu pendidikan non formal yaitu PKBM merupakan Pusat kegiatan belajar masyarakat berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan bagi masyarakat. Ini mencakup berbagai program pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. PKBM menjadi jembatan yang menghubungkan individu yang ingin belajar dengan fasilitator dan sumber daya pendidikan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola oleh masyarakat merupakan inisiatif yang sangat penting dalam membantu

memfasilitasi pendidikan non formal. Pendidikan non formal mencakup berbagai jenis program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik khusus peserta didik. Di dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), berbagai komponen pendidikan non formal dapat diselenggarakan untuk mendukung pengembangan kemampuan peserta didik. PKBM berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan formal atau ingin meningkatkan keterampilan mereka. Kabupaten Pasuruan sampai pada tahun 2023 memiliki 24 PKBM yang tersebar di setiap kecamatan.

Kegiatan pendidikan di PKBM Perlu adanya partisipasi warga belajar dan secara teratur hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan di PKBM. Ini mencakup mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan praktik. Warga belajar dapat ikut serta dalam proses perencanaan dan evaluasi program pendidikan non formal. Warga belajar dapat memberikan masukan tentang kebutuhan dan preferensi mereka, serta memberikan umpan balik tentang kualitas program yang ada. Partisipasi yang aktif dan berkomitmen dalam pendidikan akan membantu warga belajar mencapai tujuan pendidikan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sementara juga mendukung tujuan pembangunan pendidikan dan sosial yang lebih luas. Menurut Nurmalasari dkk (2023 : 117) bahwa:

Pelibatan masyarakat berbentuk perencanaan partisipatif, seperti mengidentifikasi kebutuhan secara proaktif dan memberikan ide, pendapat, dan saran untuk merencanakan proyek sesuai dengan kebutuhan. Partisipasi di implementasikan dalam bentuk komitmen untuk tetap terlibat sebagai warga belajar, meningkatkan kehadiran dan semangat.

Singkatnya di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang memiliki akses pendidikan yang minim. Dari data *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022* Kecamatan Tosari memiliki 16 SD,5 SMP,2 SMA dan 1 PKBM di 8 Desa dari 86 Dusun. Dengan kondisi geografis Kecamatan Tosari yaitu perbukitan dan pegunungan dan jauhnya lokasi SMP/SMA membuat pendidikan tidak merata sehingga masyarakat Kecamatan Tosari putus sekolah. Dari hal tersebut membuat masyarakat Kecamatan Tosari belum mampu bersaing dalam aspek sumber daya manusia sehingga dengan minimnya partisipasi pendidikan pengelola sumber daya alam yang ada sebagian besar bukan dari warga lokal melainkan warga pendatang. Lokasi Kecamatan Tosari merupakan wilayah yang strategis karena berdekatan dengan Gunung Bromo yang terkenal dengan destinasi wisata Internasional, kegiatan adat dan budaya yang masih berjalan, dan lingkungan sosial yang mendukung. Data Angka Partisipasi Murni dan Kasar menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan 2020-2022**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2020	2021	2022
SD/MI	98,77 %	98,56 %	97,49 %
SMP/MTS	82,28 %	82,07 %	81,96 %
SMA/SMK/MA	46,37 %	45,54 %	47,09 %

*Sumber : Pasuruan dalam Angka 2022 dan 2023*

**Tabel 2**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan 2020-2022**

### Pendidikan di Kabupaten Pasuruan 2020-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2020	2021	2022
SD/MI	107,87 %	108,73 %	109,07 %
SMP/MTS	102,35 %	102,11 %	106,92 %
SMA/SMK/MA	71,18 %	71,37 %	72,12 %

*Sumber: Pasuruan dalam Angka 2022 dan 2023*

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2022 Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) atau presentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah dapat mencerminkan beberapa permasalahan atau tantangan dalam sistem pendidikan. dan Kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) atau presentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya dapat mencerminkan tingkat partisipasi umum dalam pendidikan pada tingkat tertentu. Artinya partisipasi pendidikan di Kabupaten Pasuruan 2020-2022 pada jalur non formal yang tidak tergantung pada batasan usia mengalami kenaikan. Data tersebut di dukung oleh meningkatnya partisipasi pendidikan di PKBM khususnya di Kecamatan Tosari yaitu pada tahun 2020 : 172 peserta didik, 2021 : 201 peserta didik dan 2022: 237 peserta didik.

PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi pendidikan yaitu PKBM Wijaya Kusuma yang berada di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Menjadi satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki berbagai prestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional. Adapun program yang diberikan antara lain Pendidikan kesetaraan

paket A (SD), Paket B (SMP), Pendidikan paket C (SMA) ,Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri,Taman Bacaan Masyarakat, Kursus Bahasa Inggris, Kursus Komputer dan Pelatihan Kejuruan/Lifeskil. Program PKBM Wijaya Kusuma secara umum untuk pemeratakan pendidikan dan kemampuan(life skil) secara luas khususnya bagi masyarakat Kecamatan Tosari agar bisa menciptakan usaha bagi mereka. Program yang dilakukan juga memberikan dampak yang positif sehingga alumni pesera didik dapat bekerja di instansi pemerintahan dan maupun instansi swasta yang berada di lingkup Kecamatan Tosari. Namun disisi lain kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah formal menurun yang di sebabkan oleh beberapa indikator. Berdasarkan latar belakang tersebut dipandang cukup penting untuk menjelaskan PKBM Wijaya Kusuma lebih lanjut. Dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat atau warga belajar dalam pendidikan serta pelatihatyang dilakukan dalam peningkatan partisipasi pendidikan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi PKBM dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi PKBM dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi PKBM dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kecamatan Tosari Kabupaten

Pasuruan.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi PKBM dalam peningkatan partisipasi pendidikan di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai objek studi, serta tujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pelaksanaan pendidikan di PKBM. Selain itu, permasalahan penelitian dapat dijabarkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang ingin diteliti, seperti faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, keberhasilan program pendidikan di PKBM, atau perbandingan dengan model-model pendidikan lainnya.
- b. Dalam penelitian ini, dapat menggali lebih dalam mengenai intervensi partisipasi pendidikan dan memeriksa kontribusinya terhadap teori-teori yang ada. Fokus penelitian dapat melibatkan analisis terhadap teori-teori yang digunakan dalam konteks intervensi partisipasi pendidikan, serta bagaimana implementasi intervensi tersebut dapat memperkaya atau memperbaiki teori-teori yang telah ada.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga, penelitian dapat difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan pengembangan dan peningkatan partisipasi pendidikan di PKBM Wijaya Kusuma.

- b. hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi pendidikan di PKBM, sehingga masyarakat dapat lebih menyadari dan mendukung kegiatan pendidikan di wilayah mereka.
- c. Bagi Peneliti, penelitian dapat fokus pada identifikasi konsep-konsep baru atau kerangka pemikiran yang muncul dari hasil penelitian, serta bagaimana pengetahuan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang partisipasi pendidikan.